

**PERAN ‘SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)’ PADA
PENANGANAN MASALAH-MASALAH SOSIAL**

Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo



Disusun oleh:

DHILA KHOIRUNNISA

NIM: 19200010058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
INTERDISIPLINARY ISLAMIC STUDIES
KONSENTRASI PEKERJAAN SOSIAL

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhila Khoirunnisa, S.Sos
NIM : 19200010058
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Dhila Khoirunnisa, S.Sos

NIM. 19200010058

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhila Khoirunnisa, S.Sos
NIM : 19200010058
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerja Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Dhila Khoirunnisa, S.Sos
NIM. 19200010058

NOTA DINAS PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul:

**PERAN 'SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)' PADA
PENANGANAN MASALAH-MASALAH SOSIAL
Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo**

Yang ditulis oleh :

Nama : Dhila Khoirunnisa, S.Sos

NIM : 19200010058

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

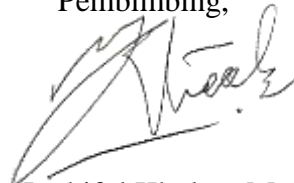
Konsentrasi : Pekerja Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (MA).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Pembimbing,



Drs. Lathiful Khuluq. M.A., BSW., Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1221/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN 'SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)' PADA PENANGANAN
MASALAH-MASALAH SOSIAL Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHILA KHOIRUNNISA, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010058
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 639bf11f82b9c

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari
SIGNED



Valid ID:
639bd3268679b

Penguji II

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Penguji III

Dr. Sri Widayanti



Valid ID:
639c20f120c1f

Yogyakarta, 15 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Abstrak :

Permasalahan sosial yang terjadi berawal dari faktor kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Karena dengan permasalahan kemiskinan tersebut membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang negatif. Hal tersebut tentunya harus ada pemecahan masalah supaya segala permasalahan sosial tersebut dapat diselesaikan dan diubah kearah yang lebih baik. Inovasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu terobosan untuk memecahkan permasalahan sosial terutama untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk mengetahui apakah SLRT Wijaya Makmur sudah menolong masyarakat dalam penanganan keluhan yang mencakup berbagai program sosial, menurunkan angka kemiskinan masyarakat kota Sukoharjo. Kemudian peranan SLRT Wijaya Makmur kepada masyarakat miskin dan rentan miskin diwilayah Sukoharjo sudah merasakan manfaatnya dan rasa kepuasan masyarakat penerima layanan tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan peranan SLRT Wijaya Makmur dalam melayani masyarakat Sukoharjo untuk mendapatkan perlindungan sosial. Karena hal tersebut akan sejalan dengan fungsi dalam aturan Permensos no 15 tahun 2018. SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan tujuan SLRT berdasarkan Permensos No. 15 Tahun 2018 pasal 2 dan sesuai dengan RPJMD, Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo dalam pengentasan kemiskinan dan rentan kemiskinan . Dengan sasaran keluhan diberbagai bidang seperti pemutakhiran data, jaminan kesehatan, Pendidikan, bencana sosial, bencana alam dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya juga terdapat kendala atau permasalahan yang ditemui dalam melayani masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci : *SLRT Wijaya Makmur Sukoharjo, Peranan SLRT di Kabupaten Sukoharjo, Kendala SLRT.*

Abstract :

The social problems that occur originate from the poverty factor experienced by the community. Because the problem of poverty makes people do everything they can to meet their needs in a negative way. Of course there must be a solution to the problem so that all these social problems can be resolved and changed in a better direction. The innovation of the Wijaya Makmur integrated Referral Service System (SLRT) Program in Sukoharjo Regency is one of the breakthroughs to solve social problems, especially for the poor and vulnerable to poverty. With the Wijaya Makmur SLRT has helped the community in handling complaints which include various social programs, reducing the poverty rate of the people of Sukoharjo city. Then the role of the Wijaya Makmur SLRT for the poor in the Sukoharjo region has felt the benefits and a sense of satisfaction for the people receiving the service. Data collection techniques using the method of observation,

interviews and documentation. The data analysis technique making sense of descriptive qualitative. The results of this study explain the role of SLRT Wijaya Makmur in serving the people of Sukoharjo to get social protection. Because this will be in line with the function in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 15 of 2018. SLRT Wijaya Makmur, Sukoharjo Regency has implemented the objectives of the SLRT based on Permensos No. 15 of 2018 article 2 and in accordance with the RPJMD, Vision and Mission of Sukoharjo Regency in alleviating poverty and being vulnerable to poverty. With the target of complaints in various fields such as updating data, health insurance, education, social disasters, natural disasters and so on. Along the way, there are also obstacles or problems encountered in serving the community. This study uses a descriptive qualitative approach.

Keywords : SLRT Wijaya Makmur Sukoharjo, Role of SLRT in Sukoharjo Regency, SLRT Constraints.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penelitian dan penulisan tesis dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dan menunjukkan kepada kita zaman yang penuh dengan nikmat ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar magister. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terkira kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis dengan judul “Peran ‘Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT’) Dalam Masalah-masalah Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil., Al Makin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala ilmu dan menjadi teladan yang baik bagi penulis untuk senantiasa melangkah maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas segala peluh dan jasa yang diberikan untuk kemajuan Fakultas Pascasarjana.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) yang telah bersedia mengayomi, mendampingi dan senantiasa menjadi teman cerita yang baik selama penulis mengenyam indahnyanya bangku perkuliahan.

4. Bapak Drs. Lathiful Khuluq. M.A., BSW., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing tesis yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis menyusun tesis mulai dari langkah ke langkah.
5. Ibu Andayani dan Bapak Sukanto selaku Dosen S1 yang selalu membimbing setiap kali penulis membutuhkan arahan dan bimbingan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada para Dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas Peksos A angkatan 2019 ganjil. Terimakasih atas curahan ilmu, inspirasi, dan motivasi yang telah diberikan kepada kami khususnya peneliti, sehingga peneliti mendapatkan pengalaman, pandangan dan juga wawasan baru yang belum didapatkan.
7. Ibu Partini, Bapak Junari dan Adikku Alya, seluruh keluargaku tercinta, yang telah mengajari penulis segalanya dan senantiasa menjadi tempat penulis untuk pulang.
8. Teman-teman konsentrasi Peksos 2019 semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap langkah hidup yang dijalani.
9. Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut.
10. Dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal dan semua perbuatan baik pihak-pihak tersebut dapat diterima dan dibalas dengan jauh lebih baik dari yang mereka berikan kepada penulis. Semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai. Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian ini dimasa mendatang. Semoga tesis sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Dhila Khoirunnisa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

LA TAHZAN, INNALLAHA MA'ANA

Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.

(QS. At Taubah ayat 40)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN TESIS	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VIII
MOTTO	XI
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan.....	31

BAB II SEJARAH SISTEM LAYANAN RUJUKAN

TERPADU (SLRT)	33
1. Pengertian Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).....	33
2. Sejarah Pendirian Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo.....	44
3. Inovasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo.....	51
4. Permasalahan-Permasalahan Sosial Yang Ada Di Kabupaten Sukoharjo.....	58

BAB III PERAN SLRT DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

1. Peran SLRT Wijaya Makmur di Kabupaten Sukoharjo	62
2. Peran Stakeholder di Lapangan.....	91
3. Kendala Yang Dialami	94
4. Solusi Yang Dilakukan Ketika Terjadi Kendala.....	100

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	104
2. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, etnis, budaya, dan keragaman lainnya. Namun adanya keragaman tersebut terkadang justru malah menambah masalah yang ada. Banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia. Problem yang kerap didengar yaitu problem sosial, masalah kemiskinan, radikalisme, konflik antar etnis, distingsi agama, dan berbagai permasalahan yang ada, tapi tidak ditemui jalan keluarnya sampai saat ini.

Problem kemasyarakatan merupakan segala keadaan yang tidak diharapkan, tidak mengenakan, kurang menggembirakan, dan pada keadaan tersebut dirasa butuh perubahan, pembaharuan, dan penanggulangan masalah.¹ Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yaitu permasalahan ekonomi dengan garis kemiskinan. Standar kemiskinan bulan September 2021 ialah sebanyak Rp486.168,- per kapita setiap bulan. Dikomparasikan pada bulan Maret 2021, Garis Kemiskinan melonjak sebanyak 2,89 persen. Sedangkan jika dikomparasikan dengan September 2020, terdapat kelonjakan sebanyak 5,93 persen.²

Selain permasalahan kemiskinan, masalah sosial lainnya yaitu konflik ras. Konfrontasi Ras adalah satu dari problem kemasyarakatan yang acap kali ada antara warga Indonesia yakni konflik antar ras, sebab belum mampu memufakati perbedaan

¹ Adi Fahrudin, *Model Penanganan Permasalahan Sosial: Pilihan Kebijakan dan Program*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2013).

² Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021, BRS No.07/01/Th. XXV, 17 Januari 2022.

yang terdapat pada warga multikultural. Definisi masyarakat merupakan sekelompok orang dua atau lebih yang bersatu dalam lini masa khusus. Negara Indonesia dapat terbentuk sebab adanya kelompok manusia yang semestinya Bersatu dalam menggapai *goals* bersama tidak dalam *goals* personal.³

Problema sosial yang ada diantaranya juga kenakalan remaja. Kenakalan remaja tersebut bermuara terhadap bobroknya mental remaja saat menghadapi perkembangan perubahan sosial. Kenakalan remaja ini terjadi karena beberapa faktor yaitu kemiskinan, pendidikan yang rendah dari orangtua maupun anak, dan pengaruh lingkungan sekitar yang membuat remaja menjadi rusak dari segi psikologis maupun mentalnya.

Radikalisme merupakan suatu pemikiran yang dilandaskan terhadap kepercayaan mengenai nilai, gagasan, serta sudut pandang yang dimiliki seseorang yang dianggap sebagai yang paling betul dan mengatakan yang lain tidak benar. Begitu tertutup, sukar berkomunikasi, dan hanya bicara dengan komunitas sendiri. Manusia yang menganut radikalisme pasalnya anti menerima pendapat berbeda.⁴ Ada berbagai macam radikalisme yaitu radikalisme agama dan radikalisme pendidikan. Radikalisme beragama biasanya mengarah pada fanatik terhadap suatu paham keagamaan yang memicu adanya terorisme, sehingga radikalisme ini menjadi suatu permasalahan sosial yang perlu di pecahkan.

³ Merri Andini, *Pancasila dan Permasalahan Sosial*, (Madiun: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana). hlm 4

⁴ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016) hlm 4

Permasalahan sosial yang dominan di Indonesia, penyebab awalnya adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Masyarakat miskin sangat mudah mengalami masalah sosial dan akan semakin menebar karena terstruktur hingga semua anggota keluarga mengalami masalah seperti lansia terlantar, kenakalan remaja karena berada di lingkungan yang rentan sosial, dsb.

Kemiskinan dianggap menjadi problem sosial yang kompleks dan sukar untuk dicari jalan keluar. Situasi kemiskinan pada beragam dimensi serta implikasinya, adalah corak problem sosial yang mengilustrasikan keadaan kemakmuran yang minim. Dengan demikian, wajar jika kemiskinan menjadi inspirasi untuk aksi perubahan dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Pada tahun 2020 dampak besar terjadi di belahan dunia, hal ini dikarenakan adanya permasalahan Kesehatan yang membuat seluruh perekonomian menjadi stagnan. Masalah Kesehatan tersebut adalah wabah yang dinamakan Covid-19 tersebut, membuat seluruh aktivitas perkantoran, ekonomi dan lainnya dibatasi bahkan harus bekerja dirumah. Belum lagi penanganan masalah kesehatan yang begitu rumit dan membuat masyarakat terkungkung di dalam rumah. Dampak dari hal tersebut adalah lesunya perekonomian yang membuat perusahaan harus mengurangi karyawannya, dan para pedagang diwajibkan untuk menutup lapaknya, dan usaha-usaha lain yang harus gulung tikar dari dampak tersebut. Dampak dari permasalahan tersebut berimbas pada masyarakat-masyarakat yang tinggal di ibu kota kemudian

⁵ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015) hlm. 308

kembali ke desa, karena sudah tidak memiliki pekerjaan kembali. Akhirnya terjadi permasalahan sosial dimana dampak Covid-19 membuat masyarakat di kota maupun di pedesaan merasakan imbas tersebut. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya karena harus tinggal di rumah. Dan ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi pada awal tahun 2020 sampai tahun 2021.⁶

Permasalahan global tidak hanya Covid-19, akan tetapi adanya tekanan geopolitik Rusia-Ukraina yang juga sangat berpengaruh pada perekonomian dunia. Kejadian tersebut bisa diketahui dari berbagai adanya dampak yang ditimbulkan baik di sector energi, pangan dan perdagangan. Dampak ini nyata dan sekarang telah dihadapi bahkan berdampak pada masyarakat lokal. Dimana dari dampak tersebut membuat bahan energi, pangan dan lainnya ada yang sampai mengalami kelangkaan. Belum lagi harga-harga kebutuhan mulai merangkak naik. Dan ini menjadi permasalahan sosial yang dihadapi baik dunia, negara, wilayah, sampai pada tingkat lokal. Dan hal ini tentunya harus segera diselesaikan supaya mereka kembali berdaya untuk kehidupan yang produktif kembali.⁷

Keragaman permasalahan sosial yang ada di Indonesia membuat proses pemecahan maupun penyelesaian masalah tersebut menjadi sulit dan tidak terkendali.

Pemecahan masalah sosial harus melibatkan berbagai sector baik pemerintah maupun

⁶ Triyan Pangestuti. Gubernur BI: Cermati 5 Masalah Ekonomi Global, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/858101/gubernur-bi-cermati-5-masalah-ekonomi-global> accsses pada tanggal 30 November 2022.

⁷ Dara Haspramudilla. Dinamika Ekonomi Global dan Pengaruhnya Bagi Indonesia, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dinamika-ekonomi-global-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia> pada tanggal 30 November 2022.

masyarakat itu sendiri. Sebenarnya masyarakat sendiri yang merasakan dampak adanya masalah sosial, oleh sebab itu keberadaan masalah sosial tersebut mengundang respon dan reaksi dari masyarakat sendiri.

Tetapi pemerintah sebagai *leading sector* juga merasakan dampak dari semua permasalahan sosial yang ada. Oleh sebab itu pemerintah mulai tergerak dan merespon dengan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dengan memberikan pelayanan sosial yang cukup maksimal agar dapat menolong masyarakat lepas dari segala permasalahan sosial.

Kebijakan sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial yaitu adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 15 tahun 2018 mengenai Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) demi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Sebelum adanya Permensos nomor 15 tahun 2018 tersebut, Kementerian Sosial sudah mulai membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diuji untuk diterapkan pada beberapa kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Kulonprogo.

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yakni sistem layanan yang menandai keperluan fakir miskin serta warga kurang mampu dan melaksanakan pedoman terhadap pengatur kegiatan penanggulangan fakir miskin serta orang tidak mampu pada kota juga daerah.⁸ Yang diadakan pemerintah pusat, Provinsi, ataupun

⁸ Permensos Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Bab 1 Pasal 1 Poin 1.

Kabupaten / Kota selaras terhadap keperluan yang ada. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pun menolong mengidentifikasi sambatan warga miskin serta rentan miskin, melaksanakan rujukan, juga mengontrol penanggulangan keluhan guna meyakinkan jika sambatan-sambatan itu ditanggulangi secara tepat.⁹

Tujuan dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini salah satunya demi mengembangkan layanan akses layanan penanggulangan fakir miskin juga orang tidak mampu serta menyokong perluasan cakupan pelayanan dasar.¹⁰ Khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan jantung atau inti sistem dari pelayanan sosial di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tahun 2016 menggunakan nama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) “Wijaya Makmur”. Dengan beberapa fasilitas yang dikasihkan langsung Kementerian Sosial yakni 1 komputer, pc, dan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Adapun dari pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo juga mendukung program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan memberikan beberapa fasilitas seperti Sekretariat yang berada di salah satu ruangan di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

⁹ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, *Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017, Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.*

¹⁰ Permensos Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Bab 1 Pasal 2

Kabupaten Sukoharjo juga memiliki 2 Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Desa / Kelurahan yang berada di Kecamatan Polokarto dan diberikan beberapa fasilitas dari Kementerian Sosial yaitu Komputer, Pc, dan ATK serta pedoman pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).

Adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa / Kelurahan ini diharapkan pelayanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Serta pendataan warga yang merupakan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terdata dengan baik dan update sesuai dengan tingkat kesejahteraannya. Selain itu penerapan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) khususnya pada Kabupaten Sukoharjo diharap dapat mempercepat proses penyelesaian masalah yang sedang dialami oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Permasalahan Sosial yang sering masuk pada catatan atau manuskrip di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yaitu diantaranya Permasalahan masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial layaknya Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP), Permohonan Surat Rujukan / Pengantar bagi Penyandang Disabilitas maupun Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan layanan serta bantuan.

Pada awal pendirian Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada beberapa Kabupaten / Kota semua biaya pendirian serta operasional ditanggung oleh

Kementerian Sosial beserta sarana prasarananya. Setelah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dirasa sudah berlangsung secara akurat dan kabupaten / Kota mampu untuk melaksanakannya secara mandiri. Maka Kementerian Sosial melepaskan dan sudah tidak menanggung biaya operasionalnya.

Khususnya di Kabupaten Sukoharjo, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dibentuk tahun 2016 tersebut secara resmi dilepas dan sudah tidak ditanggung Biaya operasional nya oleh Kementerian Sosial pada tahun 2018. Kementerian Sosial memberikan kebebasan pada Kabupaten / Kota untuk meningkatkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah masing-masing.

Kejadian tersebut merupakan tantangan untuk Kabupaten / Kota untuk meningkatkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) kedepannya, apakah akan menjadi solusi bagi setiap permasalahan sosial di daerah kabupaten / Kota masing-masing atau justru hanya mangkrak menjadi suatu program / system yang hanya tinggal nama saja karena sudah jauh dari bimbingan dan bantuan biaya operasional dari Kementerian Sosial. Tentu saja ini bergantung pada kreatifitas dan kemampuan daerah untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tersebut. Serta kebermanfaatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini bagi masyarakat juga dipertaruhkan.

Dari permasalahan yang muncul tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian mendalam dengan tema “Dampak ‘Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)’ Pada Penanganan Masalah-masalah Sosial. Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, peneliti menggunakan fokus bahasan pada Peran adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Penanganan Masalah Sosial Kabupaten Sukoharjo, seperti apa peran dan kendala Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo. Problem tersebut akan digalih sesuai rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan Masalah Sosial di Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana kendala yang dialami dalam pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ialah demi memahami peran adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo serta Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Kendala yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diinginkan dari “Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Penanganan Masalah-Masalah Sosial Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo” ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang sudah direalisasikan ini semoga dapat menjadi kajian akademik perihal “Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Penanganan Masalah-Masalah Sosial Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini semoga dapat dijadikan khazanah keilmuan pada kelompok pekerjaan sosial terutama yang berhubungan pada penanganan masalah sosial menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

2. Manfaat praktis

Penelitian ini, semoga mampu membantu warga mengetahui mengenai Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan Masalah-masalah social di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan ilustrasi serta masukan dengan adanya peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) kedepannya membutuhkan pengembangan seperti apa agar mampu memaksimalkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten / Kota.

E. Kajian Pustaka

Untuk menyokong penelitian ini, peneliti melaksanakan analisis pada berbagai penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan terhadap problem yang disajikan pada penelitian sebagai bahan pembanding ataupun pedoman dalam penulisan tesis, yakni:

Pertama, Jurnal Ilmiah Dwi Heru Sukoco yang dikeluarkan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan judul “Efektivitas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Sibalulungan” Kabupaten Bandung”. Jurnal yang ditulis Dwi Heru Sukoco ini memaparkan mengenai Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang parsial dan tidak terpadu, sedangkan kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) selalu ditingkatkan serta diaplikasikan. Hasil dari penelitian, yaitu Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung yang dirintis tahun 2016 ini sudah menyumbangkan kontribusi bagi indeks kemiskinan menjadi 6,65% hingga menurun dari indeks kemiskinan nasional yaitu 9,82%.

Perbedaan penelitian adalah pada fokus penelitian dan metode penelitian. Pada penelitian ini mengukur tingkat efektivitas adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti akan membahas mengenai dampak setelah adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Selain itu perbedaan ada pada metode penelitian, jika kajian sebelumnya memilih menerapkan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitasnya sementara penelitian yang akan dilaksanakan ini memilih menerapkan metode

kualitatif sehingga lebih leluasa saat mendeskripsikan kondisi atau dampak setelah penerapan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo.

Kedua, Jurnal Ilmiah karya Firda Awaliyah dan Juliannes Cadith diterbitkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Serang”. Jurnal ini membahas mengenai realisasi SLRT di Kota Serang. Hasil penelitian jurnal ini yakni SLRT Kota Serang belum berlangsung maksimal karena sosialisasi terkait SLRT hanya dilaksanakan di 6 Kelurahan yang terdapat pada Kota Serang. Selain itu aspek SDM pada beberapa Puskesmas belum memadai sebab banyaknya masyarakat yang melaksanakan pengaduan belum sebanding dengan banyaknya SDM pada Puskesmas. Fasilitas yang ada juga terbilang kurang apik karena computer dan tab yang digunakan secara bergantian dengan petugas kelurahan.

Perbedaan penelitian yaitu terletak dalam fokus penelitian dan latar yang dikaji. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan yang berhubungan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), sedangkan penelitian ini memaparkan perihal dampak setelah penerapan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Untuk latar penelitian, penelitian yang dilaksanakan oleh Firda Awaliyah ini berada di Kota Serang sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti memiliki latar di Kabupaten Sukoharjo.

Ketiga, Skripsi karya Lingga Nirwana Nirasiwi dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dalam Rangka Penanganan Fakir

Miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Skripsi yang ditulis oleh Lingga Nirwana Nirasiwi ini membahas mengenai implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal dengan mengupas sistem yang ada didalamnya diantaranya komunikasi, sumber daya yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal serta Mekanisme Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Firda Awaliyah dan Juliannes Chadith yang membahas membatasi hanya pada realisasi kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) saja, hanya saja yang membedakan antara penelitian Firda dengan penelitian Lingga yaitu latar tempatnya, penelitian yang dilakukan oleh Lingga ini berada di Kabupaten Kendal. Jelas kedua penelitian ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang dilaksanakan peneliti karena dibatasi dengan implementasi kebijakan saja, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan ini akan mengupas mengenai peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada penanganan problem-problem sosial.

Keempat, Jurnal karya Vrisko Chentari dan Karjuni Dt Ma'ani dengan judul "Kualitas Pelayanan Tim Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Nagari Sago Salido Kabupaten Pesisir Selatan". Jurnal ini dikeluarkan Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNP, Padang. Hasil penelitian jurnal ini yaitu ada berbagai hal yang menjadikan kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) belum dijalankan pada masyarakat yakni terhadap regu Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu

serta warga tersebut. Pelayanan yang disediakan regu pelaksana tidak selaras SOP Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tersebut belum terjalankan secara optimal.

Perbedaan penelitian jelas terlihat dalam fokus penelitian. Pada penelitian ini menitikberatkan terhadap mutu pelayanan regu pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan jelas lebih luas yaitu membahas peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada penanganan problem-problem sosial.

Penelitian mengenai Sistem Layanan Rujukan Terpadu dalam Penanganan fakir miskin mungkin saja sudah pernah dilakukan di Daerah lain tetapi untuk kekhususan tema Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu pada Penanganan Masalah-masalah Sosial di Kabupaten Sukoharjo menjadi penelitian pertama yang dilakukan. Tentu saja penelitian ini akan menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena target dari penelitian ini yaitu menemukan peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada Penanganan Problem-problem Sosial yang ada pada Kabupaten Sukoharjo. Peneliti juga akan mengelompokkan berbagai problem yang terdapat pada kabupaten Sukoharjo terlebih pada problem yang akarnya pada kemiskinan.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial ialah kebijakan publik. Kebijakan sosial yakni ketentuan pemerintah yang ditujukan dalam menanggapi masalah-masalah umum, yaitu menangani problem sosial atau menyediakan keperluan khalayak.¹¹

Kebijakan sosial merujuk pada hal yang dilaksanakan pemerintah sebagai usaha dalam mengembangkan mutu hidup manusia dengan pemberian berbagai tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan sosial lain.¹²

Sebagai kebijakan publik, kebijakan sosial mempunyai fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) serta pengembangan (developmental). Kebijakan sosial merupakan ketentuan yang disusun secara bersama-sama guna menghalangi meunculnya problem sosial (fungsi preventif), menangani problem sosial (fungsi kuratif) dan mengiklankan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai bentuk kewajiban negara (state obligation) untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakatnya.¹³

Ada istilah negara kesejahteraan yang seringkali dikaitkan dengan kebijakan sosial. Di berbagai negara kebijakan sosial ini dianggap sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi pada rakyatnya atau bisa juga kebijakan sosial ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh

¹¹ Edi Soeharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung; Alfabeta, 2013). hlm 10

¹² *Ibid*, hlm.11

¹³ Edi Soeharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung; Alfabeta).

rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan ini tentu saja mencakup berbagai kebijakan sosial.

Kebijakan sosial sebagai sarana pemecahan masalah sosial. Problem sosial diartikan suatu keadaan yang tidak diinginkan dan selalu menyokong adanya aksi dalam melaksanakan perubahan dan pembaharuan pada keadaan itu.¹⁴ Mekanisme menuju keadaan yang lebih baik acap kali menyangkutkan bermacam pihak, menerapkan beragam pendekatan, taktis, dan menggunakan banyak sumberdaya. Kesemuanya itu merupakan komponen-komponen yang diperhitungkan dalam merumuskan proses perubahan yang terencana. Adapun tindakan sosial tersebut mengandung lima elemen yang disebutnya sebagai *The Five C's of Social Action*, yang terdiri dari *Cause*, *Change Agency*, *Change Target*, *Channel*, dan *Change Strategy*.¹⁵

Cause, dimaksudkan sebagai aspek yang mengakibatkan dilaksanakannya aksi dalam melakukan perubahan serta pembaharuan. Aspek tersebut adalah keadaan yang diidentifikasi sebagai problem sosial itu sendiri. Dalam kenyataannya keadaan yang membutuhkan perubahan bisa bermula dari masyarakat yang menjadi pengidap problem ataupun kondisi system serta lembaga sosial yang belum terealisasikan secara tepat.¹⁶

¹⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*, 2015 Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 21

¹⁵ *Ibid*, hlm.22

¹⁶ *Ibid*,

Change Agency adalah organisasi dari lingkungan masyarakat sendiri atau dari luar yang berguna untuk menyokong, memfasilitasi adanya perubahan. Dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan perubahan, *change agency* dapat menggunakan pendekatan yang bersifat mengarahkan, tetapi dapat pula menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif.¹⁷

Change Target adalah individu, kelompok atau institusi yang menjadi sasaran perubahan. Fokus perhatian pada sasaran individu sebagai penyandang masalah atau pada sistem dan institusi sosialnya sangat ditentukan oleh pendekatan yang diterapkan saat menganalisa masalah, yang pada umumnya berada diantara *person blame approach* serta *system blame approach*.¹⁸

Channel adalah saluran yang berfungsi menghubungkan antara *change agency* dengan *change target*. Dalam pelaksanaannya dapat dibedakan adanya saluran untuk memasukkan pengaruh sebagai stimulasi perubahan, dan saluran untuk melakukan respons terhadap stimuli. Baik saluran untuk memasukkan pengaruh / stimuli maupun untuk melakukan respons dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu saluran dalam bentuk media dan saluran personal.¹⁹

Change Strategy adalah cara *change agency* mempengaruhi sasaran dalam rangka mewujudkan perubahan. Strategi yang digunakan akan menentukan keberhasilan atau efektivitas tindakan. Pilihan strategi yang digunakan banyak

¹⁷ *Ibid*, hlm. 23

¹⁸ *Ibid*, Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*..... hlm. 23

¹⁹ *Ibid*,

mempertimbangkan kondisi masyarakat, bentuk masalah, dan potensi perubahan yang ada.²⁰

Salah satu bentuk susunan aksi negara demi menangani problem sosial ialah kebijakan sosial. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila pada berbagai agenda kebijakan sosial selalu dikenal sebagai wujud respons terlebih oleh negara pada problem sosial. Sebuah kebijakan bisa dirumuskan dengan apik jika dilandaskan pada data serta fakta yang benar.²¹

2. Pelayanan Sosial

Salah satu bentuk kebijakan sosial ialah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial merupakan perbuatan atau tindakan guna menangani problem sosial. Pelayanan sosial dimaknai sebagai seperangkat kegiatan yang digunakan dalam menolong seseorang atau kelompok yang mengalami halangan dalam melengkapi keperluan hidupnya. Jika kondisi pribadi atau komunitas dibiarkan, maka akan memunculkan problem sosial, meliputi kemiskinan, ketelantaran, serta kejahatan kriminal.²²

Pengelompokan pelayanan sosial biasanya dibagi berlandaskan target pelayanan (seperti: pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia) latar atau tempat (meliputi: pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, penjara, rumah sakit)

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*, hlm.25

²² Edi Suharto. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung; Alfabeta; 2013), hlm

ataupun berlandaskan jenis atau aspek (seperti: pelayanan konseling, kesehatan psikis, pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial, perumahan).²³

Secara ideologis, pelayanan sosial dilandasi kepercayaan jika aksi dan pengorganisasian sosial adalah sebuah aksi nyata dari kebijakan sosial sebagai representasi kehendak publik dalam menyebarluaskan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pentingnya pelayanan sosial didasari kepercayaan jika kebijakan ekonomi serta publik lainnya tidak seterusnya bisa menangani problem sosial dengan tepat.²⁴

Di kawasan industri maju, layaknya AS, Inggris, Australia, serta Selandia Baru, secara umum temurun kebijakan sosial meliputi ketentuan ataupun aturan pemerintah perihal 5 aspek pelayanan sosial, yakni jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, Pendidikan serta pelayanan atau perawatan sosial personal. Kelima aspek itu diatur instansi pemerintah atau departemen, antara lain departemen kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan atau oleh badan-badan khusus yang disusun sesuai undang-undang.²⁵

3. Masalah Sosial

Permasalahan sosial merupakan sebuah keadaan yang tidak diharapkan, tidak menyenangkan, tidak menggembirakan serta pada keadaan tersebut dianggap butuh

²³ *Ibid*, hlm 13

²⁴ *Ibid*,... hlm. 14

²⁵ *Ibid*,... hlm 15

diadakan perubahan, perbaikan, dan *problem solving*.²⁶ Memahami problem sosial begitu krusial bagi mereka yang terjun pada aspek *social entrepreneurs*. Dengan memahami keluasan dan kedalaman problem, maka kami akan terbantu menemukan peluang-peluang dalam melakukan tindakan penanganan baik pencegahan, penyelesaian, ataupun peningkatan. Penyebab problem sosial begitu kompleks merentang dari dimensi yang terhubung dengan model perilaku, pola komunikasi, perubahan dan konflik nilai, hingga yang diakibatkan oleh kondisi ketidakadilan, pengabaian pada HAM serta kerusakan ekologis yang parah.²⁷

Problem sosial merupakan suatu keadaan yang lahir karena sebuah situasi warga yang kurang baik. Definisi lain yakni suatu ketidaksesuaian elemen-elemen masyarakat yang mampu mencelakakan kehidupan kelompok sosial.

Tidak hanya itu, ada pula yang memaparkan jika problem sosial adalah sebuah masalah yang berlangsung pada kehidupan masyarakat yang dikarenakan interaksi sosial yang tidakimbang. Problem tersebut dapat berupa apapun, antara lain problem agama, budaya, etnis, hukum, dan sebagainya. Lebih detailnya berikut berbagai definisi problem sosial menurut para ahli.²⁸

Soejono Soekamto, masalah sosial adalah keadaan yang berlangsung sebab terdapat ketidaksesuaian antara hubungan kebudayaan serta hubungan pada

²⁶ Adi Fahrudin, *Model Penanganan Permasalahan Sosial: Pilihan Kebijakan dan Program*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2013).

²⁷ Muhammad Budi Taftazani., *Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial, 2017*, Social Work Journal.

²⁸ Kelas Maya Terbaik, Pengertian Masalah Sosial Faktor dan Contohnya, 2020, https://definispengertian.net/pengertian-masalah-sosial/#Pengertian_Masalah_Sosial. Accesses pada tanggal 20 April 2020.

masyarakat. Di mana keadaan tersebut seharusnya mampu mencelakakan keberlangsungan hidup pada kelompok sosial.²⁹

Pada intinya masalah merupakan ketidakseimbangan antar hubungan yang menyebabkan munculnya resiko maupun dampak bagi berbagai pihak. Berbagai jenis masalah khususnya di Indonesia ini sangat beragam mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, budaya, masalah agama, suku, dan ras juga terkadang menimbulkan masalah dan memicu adanya konflik sosial.

Jika dalam pekerja sosial ada istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebelumnya adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permensos No. 08 Tahun 2012 mengenai pijakan Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 3, PMKS merupakan individu, keluarga, komunitas, dan/atau masyarakat yang disebabkan halangan, kesusahan, tidak mampu melakukan fungsi sosialnya hingga kurang mampu melengkapi kebutuhan hidupnya baik fisik, psikis, ataupun kemasyarakatan secara cukup dan wajar. Jenis-jenis PMKS, antara lain:³⁰

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak Berhadapan dengan Hukum
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak dengan Kedisabilitas

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Permensos Nomor 8 Tahun 2012

- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perilaku yang salah
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 8) Lanjut Usia terlantar
- 9) Penyandang Disabilitas
- 10) Pengemis
- 11) Tuna Susila
- 12) Gelandangan
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok Minoritas
- 15) Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 16) Orang dengan HIV / AIDS
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 18) Korban Trafficking
- 19) Korban Tindak Kekerasan
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- 21) Korban Bencana Alam
- 22) Korban Bencana Sosial
- 23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 24) Fakir Miskin
- 25) Keluarga Bermasalah sosial psikologis
- 26) Komunitas Adat Terpencil

4. Solusi Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial saat ini sangat dinamis dan sulit untuk di prediksi apa penyebabnya, seperti apa latar belakang masalahnya, dimana titik permasalahannya dan seperti apa solusi yang tepat karena dalam setiap masalah sosial tentu saja memiliki cara pemecahannya yang berbeda.

Problem solving secara bahasa berasal dari dua kata yaitu “ *problem* dan *solves*.” Makna bahasa dari problem yaitu “*a thing that is difficult to deal with understand*” (suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya). Jika diartikan “*a question to be answered or solve*” (pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar). Sedangkan solve dapat diartikan “*to find to answer to problem*” (mencari jawaban suatu masalah). Sedangkan secara terminologi seperti yang diartikan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zayn problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah.³¹

Problem solving adalah kemampuan untuk menganalisa masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut Umar Hamalik problem solving adalah suatu atau sebuah proses mental serta intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkannya dengan berdasarkan pada data serta informasi yang ada untuk mengambil sebuah kesimpulan yang tepat dan cermat. Defesini lainnya dari Santrok, problem solving adalah sebuah cara yang dilakukan

³¹ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 102

untuk menemukan jalan atau solusi yang sesuai di dalam suatu pencapaian tujuan.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa dimaknai suatu metode ilmiah guna menemukan data yang benar dengan tujuan dapat dijumpai, ditingkatkan, dan dibuktikan hingga mampu dipakai terhadap pengembangan khazanah pengetahuan atau *problem solving*.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berdasarkan terhadap filsafat postpositivisme, diterapkan guna mengkaji keadaan objek yang alamiah, (antonimnya ialah eksperimen) peneliti adalah alat kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif serta hasil penelitian lebih mengedepankan arti juga generalisasi.³³

Penentuan fokus pada proposal dilandaskan terhadap strata kefaktualan informasi yang didapatkan dari keadaan sosial (lapangan).³⁴ Lapangan pada keadaan ini ialah pihak pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo baik pejabat struktural maupun fungsional yang melakukan ikut andil dalam realisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

³² Kasinda, Filia Amelia, Reyka Desta Vira, dkk. Makalah Teori *Problem Solving*, 2020, (Toraja: IAKN) hlm. 3.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 2017, (Bandung: Alfabeta), hlm. 9.

³⁴ *Ibid*, hlm 209.

Jenis pengumpulan data pada penelitian yaitu memanfaatkan sumber utama berbentuk wawancara langsung serta observasi partisipatif yang dilaksanakan peneliti, tetapi tidak menghiraukan data pendukung berbentuk manuskrip ataupun Permensos dan Surat Keputusan atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dan juga kebijakan realisasi yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang menggambarkan efektivitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek merupakan individu yang berkaitan pada pemberian data mengenai keadaan tempat penelitian.³⁵ Subjek penelitian pada kajian ini ialah pejabat struktural, satu petugas *front office* Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan satu petugas *back office*, serta beberapa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang datang untuk mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menerapkan teknik *non probability sampling* yang memanfaatkan *purposive sampling* pada penentuan narasumber. Purposive subjek adalah teknik penentuan narasumber sesuai kriteria khusus.³⁶ Kriteria khusus tersebut, seperti:

³⁵ Papalia, dkk, *Human Development*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm 310.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*. hlm. 219.

- 1) Pejabat struktural, dengan mempertimbangkan *job description* pada hal ini yakni berfungsi dominan pada perancangan kebijakan.
- 2) Petugas *Front office* dan *back office* Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang menangani secara langsung dalam hal pelayanan.
- 3) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan dari Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

b) Objek Penelitian

Obyek penelitian ini berkaitan dengan Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pada penanggulangan problem-problem sosial studi kasus pada Kabupaten Sukoharjo.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni tahapan guna menghimpun data. Pada penghimpunan data wajib menerapkan teknik yang pas agar data diperoleh dengan baik dan tepat selaras dengan fakta pada lapangan. Metode pengumpulan data yang diterapkan ialah:

a. Observasi

Observasi merupakan landasan segala ilmu pengetahuan. Para akademisi bisa bekerja berlandaskan data, yaitu realitas perihal dunia kenyataan yang didapatkan dengan observasi.³⁷ Observasi adalah kegiatan mengamati narasumber penelitian dan lingkungannya serta melaksanakan *record* dan pengambilan gambar atas perilaku yang diobservasi tanpa merubah situasi alamiah narasumber dengan wilayah sosialnya.³⁸

Observasi bisa dilaksanakn dengan terlibat (partisipatif) maupun nonpartisipatif. Observasi partisipatif ialah pengamatan yang melibatkan peneliti pada aktivitas narasumber sasaran penelitian, tanpa menyebabkan perubahan pada kegiatan yang bersangkutan serta pada kondisi ini peneliti tidak menutup dirinya. Guna memperbaiki kegiatan observasi partisipatif, peneliti wajib ikut aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan narasumber pada lini masa tertentu, memahami apa yang terjadi, mendengar segala yang diujarkan, mempertanyakan informasi yang unik, dan menganalisis manuskrip yang tersedia.³⁹

Teknik yang dipilih pada penelitian yakni observasi partisipatif. Observasi partisipatif dilaksanakan dengan memandang dan mengikuti aktivitas pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) secara langsung.

b. Wawancara

³⁷ *Ibid*, hlm. 226.

³⁸ Herdiansyah, Haris, 2015, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Depok: Rajagrafindo Persada,2015), hlm. 130

³⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 2009) hlm.101.

Wawancara merupakan obrolan yang memiliki tujuan khusus. Obrolan itu dilaksanakan 2 kubu, yakni pewawancara (*interviewer*) menyediakan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang menjawab.⁴⁰ Jadi wawancara adalah penghimpunan data dengan menggunakan berbagai pertanyaan terhadap narasumber dengan maksud memperoleh informasi yang diharapkan dengan jawaban narasumber. Macan-macam wawancara, yakni wawancara terstruktur, semiterstruktur serta tidak terstruktur.⁴¹

Teknik wawancara yang dipilih pada kajian ini ialah wawancara semi-terstruktur. Wawancara tersebut masuk kategori *in-dept interview*, yang mana pada realisasinya lebih bebas jika disejajarkan dengan wawancara terstruktur. Maksud wawancara tersebut guna menggali permasalahan secara lebih terbuka, yang mana pihak yang wawancara diminta pendapat dan gagasannya. Saat melaksanakan wawancara, peneliti wajib mendengar dengan rinci serta menulis apa yang dikkatakan narasumber.⁴²

Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan peneliti kepada pegawai yang menolong program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) secara langsung meliputi *front office*, *back office*, maupun manajer Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan juga kepada beberapa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm. 186

⁴¹ *Ibid*, Sugiyanto..... hlm 223

⁴² *Ibid*, hlm 223

c. Dokumentasi

Dokumen adalah tulisan fenomena yang telah berlangsung, dokumen berupa catatan, foto, atau karya-karya seseorang.⁴³ Dokumentasi yang dihimpun pada penelitian ialah foto aktivitas atau kebijakan tercatat yang memberi tanda adanya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) berupa Permensos maupun Surat Keputusan.

d. Teknik Analisis Data.

Bogdan, analisis data yakni tahap menggali serta merumuskan secara runtut data yang didapatkan melalui wawancara, *field noted*, serta data lain, sehingga gampang dipahami, dan temuannya bisa diberitakan terhadap khalayak. Analisis data dilaksanakan dengan menyusun data, menjelaskannya pada bagian-bagian, melaksanakan sintesa, merumuskan pada model, memilah mana yang *urgent* dan yang perlu dikaji serta menyusun kesimpulan yang bisa dikisahkan terhadap khalayak.⁴⁴

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum, selama serta di lapangan. Adapun tahap-tahap analisis data kualitatif, antara lain:

- 1) Reduksi data, yakni mengkode, merangkum serta mengelompokkan data demi mengetahui elemen-elemen krusial yang berhubungan terhadap masalah penelitian.
- 2) Pengorganisiran data, yakni pengumpulan data yang berhubungan dengan

⁴³ *Ibid*, hlm 240.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 244.

tema atau fokus bahasan khusus dan menarasikan data-datanya.

- 3) Interpretasi data, menyimpulkan pola-pola, kecenderungan serta penjabaran yang bisa menciptakan kesimpulan yang bisa dikaji lebih dalam.

e. Teknik Keabsahan Data

Guna menghitung tingkat keabsahan data pada penelitian butuh dilaksanakan uji keabsahan data. Triangulasi merupakan salah satu teknik yang digunakan. Teknik triangulasi dimaknai sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengolaborasikan dari beragam teknik pengumpulan data pun sumber data yang sudah tersedia.⁴⁵ Data yang dipakai peneliti yaitu data observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur serta dokumentasi.

Ada 3 bentuk triangulasi meliputi: triangulasi sumber, triangulasi teknik serta triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan peneliti mewawancarai pejabat struktural (Kepala Dinas dan Kepala bidang yang membidangi Sistem Layanan Rujukan Terpadu), pejabat fungsional (Penyuluh Sosial), dan juga beberapa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang akan dibandingkan bagaimana pemaparan perihal Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pada Penanganan Masalah-masalah Sosial di Kabupaten Sukoharjo.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 244

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah metode penyajian yang disusun dengan runtut. Pengaturan tersebut disusun guna memberikan ilustrasi secara penuh, komprehensif, serta runtut mengenai tesis yang dicatat peneliti sehingga melancarkan pembaca untuk memafhumi hasil penelitian. Pada penelitian ada 4 bab. Antara bab 1 dengan lainnya saling berhubungan dan membuat satu kesatuan pas. Dari 4 bab itu dipaparkan seperti:

Bab pertama adalah pengilustrasian secara general yang dikemas dalam delapan subbab layaknya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini peneliti menyampaikan fakta serta argument dasar yang akan dikaji lebih dalam pada bab berikutnya.

Bab kedua merupakan penggambaran mengenai Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang terdiri dari Definisi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan sejarah berdirinya sejarah pendirian program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo, Inovasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo, dan juga permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat pada Kabupaten Sukoharjo.

BAB III, berisi tentang hasil penelitian mengenai Peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan masalah-masalah sosial studi kasus pada Kabupaten Sukoharjoyang berisikan peran Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo, Kendala yang dialami dalam pelaksanaan Sistem

Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sukoharjo, Peran stakeholder di lapangan, dan solusi yang dilakukan ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

BAB IV penutup, meliputi kesimpulan dari seluruh tesis, dan rekomendasi untuk berbagai aktor yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Program pelayanan satu pintu SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo telah memberikan dampak yang signifikan terhadap mutu pelayanan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan akses bantuan perlindungan sosial. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memulai transformasi pelayanan SLRT pada tahun 2016 sebagai *Pilot Project* pemerintah. Akan tetapi dengan ditunjuknya sebagai salah satu wilayah yang dijadikan trial pemerintah, Kabupaten segera mempersiapkan dengan membentuk Tim koordinasi program SLRT. Berjalannya waktu SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo berkembang dengan baik, bahkan pemerintah Jawa Tengah menjadikan SLRT Wijaya Makmur sebagai fasilitator untuk mensosialisasikan program SLRT kepada pemerintah KEDU dan Surakarta. Hal tersebut menandakan bahwasanya program SLRT di Kabupaten Sukoharjo telah berhasil menjalankan program tersebut.

Peranan SLRT di Kabupaten Sukoharjo sangatlah penting, dimana pelayanan ini selalu sigap untuk melayani berbagai keluhan warga guna mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini dikarenakan program SLRT dibantu Puskesmas memberikan inovasi berupa pemutakhiran data yang membuat dimudahkannya akses pemerintah maupun masyarakat untuk mengakses informasi terkait perlindungan sosial. Pemutakhiran data tersebut juga memudahkan pemerintah untuk menyalurkan program perlindungan sosial dengan tepat sasaran. Program perlindungan sosial

seperti KIP, PKH, BPNT, KIS dan lain sebagainya dapat dibantu dalam pelayanan SLRT Wijaya Makmur. Pelayanan yang prima dari petugas SLRT Wijaya Makmur dapat dilihat dari penanganan berbagai kasus yang mampu diselesaikan dengan memuaskan.

SLRT bersama Puskesmas bekerja untuk melindungi atau memulihkan kondisi masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS. Dengan program tersebut tentunya akan memberikan perubahan dalam berbagai bentuk kegiatan perlindungan sosial. Program tersebut juga akan menolong masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kualitas prima kepada individu/keluarga/ rumah tangga miskin yang sesuai dengan prosedur yang jelas. Pelayanan SLRT ini juga tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan dijalankan sesuai dengan SOP. Pelayanan SLRT dan Puskesmas Kabupaten Sukoharjo merupakan wujud aktivasi para petugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait perlindungan sosial. Mereka menjalankan peranannya dalam memberikan pelayanan bantuan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Maka dengan hal tersebut membuat masyarakat akan memiliki daya guna kembali dan sejahtera.

Implementasi pelayanan SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo sudah dijalankan dengan baik, meskipun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para petugas untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena ini merupakan visi dan misi kabupaten Sukoharjo untuk

terus meningkatkan pelayanan dan juga mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut.

SLRT di Kabupaten Sukoharjo melakukan kolaborasi antar OPD terkait program-program yang terintegrasi antar OPD dalam memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakatnya. Maka program ini sangat menolong masyarakat dalam mengakses informasi perlindungan sosial dan menerima kemanfaatan dari program tersebut. Hal ini tidaklah berlebihan, karena program tersebut bantuan jadi tepat sasaran dan angka kemiskinan di wilayah Sukoharjo setiap tahunnya semakin menurun.

2. **Saran**

Dalam penelitian memberikan gambaran bahwasanya perjalanan program SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan petugas SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo.

- a. Bimbingan Teknik setiap tahunnya harus dilakukan kepada semua petugas SLRT baik dari manajer, supervisor, dan fasilitator. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan membuat strategi yang baik sesuai dengan evaluasi setiap tahunnya. Karena selama ini yang mendapatkan bimbingan Teknik adalah manajernya saja. Langkah ini perlu dilakukan supaya ada inovasi-inovasi terbaru yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait perlindungan sosial.

- b. Pertemuan berbagai stakeholder harus dilakukan minimal setiap setahun sekali untuk mengkomunikasikan antar lini OPD. Hal ini berkaitan dengan saling terhubungnya antar lembaga pemerintah dengan pelayanan SLRT. Maka ketika ada kendala nantinya dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.
- c. Kepada pejabat pemerintah dapat memberikan anggaran yang cukup besar kepada para fasilitator yang tidak dianggarkan dalam anggaran SLRT. Supaya mereka bersemangat dan bekerja secara maksimal dan diberikan SK yang jelas atas pekerjaan mereka. Kemudian PNS, Peksos, pelayan sosial dll, yang mengelola SLRT Wijaya Makmur diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memahami akses terkait program perlindungan sosial.
- d. Pengguna, *user*, Pemimpin Agama dan para lapisan masyarakat hendaknya bersinergi kepada institusi pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat lainnya akan pentingnya program ini. Karena program ini kemanfaatannya akan kembali kepada masyarakat untuk dapat mandiri kembali.
- e. Penelitian ini akan menjadi rujukan para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo. Karena penelitian ini hanya terfokus pada peranan SLRT dalam mengani permasalahan sosial di kabupaten

Sukoharjo terutama dalam pengangan kemiskinan. Tentunya masih ada lini-lini lain yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Syebubakar, *SLRT : Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan* Ketua Tim Sekretariat Nasional SLRT Tahun 2018.
- Achmad Jainuri, (2016). *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*, Malang: Intrans Publishing.
- Adi Fahrudin. (2013). *Model Penanganan Permasalahan Sosial: Pilihan Kebijakan dan Program*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Dinas Sosial Jawa Tengah. *Petunjuk Teknis : Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Dalam Perluasan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dalam mendukung Tata Nornam Baru Guna Rangka Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021*.
- Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021*.
- _____, *Profil Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo* . Sukoharjo : Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dinas Sosial.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, *Panduan Pemberdayaan (Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)*.
- _____, *Petunjuk Teknis : Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam Perluasan Sistem Layanan dan*

Rujukan Terpadu (SLRT) Dalam Mendukung Tatahan Normal Baru Guna Rangka Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 . Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah,2021

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, *Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017, Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.*

_____, *Kementerian Sosial Republik Indonesia, Membangun Lembaga Pelayanan dan Perlindungan Sosial Terpadu* (Jakarta : Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat,2017

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat. *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan.* . Jakarta :Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat 2017.

Edi Soeharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung; Alfabeta.

_____. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta.

Firda Awaliah dkk, *Implemetasi Kebijakan Sisitem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kota Serang* .Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vo. 8 No. 3 Tahun 2021.

- Franciscus Xaverius Wartoyo, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*. Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016.
- Haris Herdiansyah. (2015). *Wawancara Observasi dan Focus Group*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Hartono Laras.(2017). *Pedoman umum pelaksanaan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)*.
- Heru Sukoco dwi, *Efektivitas Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Sabilulungan” Kabupaten Bandung*, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, PEKSOS: Jurnal ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 19 No. 1, Juni, 2020.
- Kasinda, Filia Amelia, Reyka Desta Vira, dkk. *Makalah Teori Problem Solving*, 2020, (Toraja: IAKN)
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT Dan Puskessos*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM), 2020.
- _____. *Membangun Lembaga Pelayanan dan Perlindungan Sosial Terpadu*. Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, *Pedoman Umum Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan Kemiskinan, 2017*
- Lexy J. Moleong.(2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Merri Andini, *Pancasila dan Permasalahan Sosial*, Madiun: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana.
- Muhammad Budi Taftazani., *Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial, 2017*, Social Work Journal.

Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Airlangga.

Papalia, dkk.(2008). *Human Development*, Jakarta: Prenada Media Group.

Soetomo. (2015). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya, 2015 Cetakan IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sri Sulastri dan Sahadi Humaedi, *Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*. PROSIDING KS: RISET & PKM Vol.4 No.1 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2017*, Bandung: Alfabeta.

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar, 2002*, Jakarta: Rineka Cipta.

Referensi lainnya :

<https://dinsos.sukoharjokab.go.id/berita/penyaluran-bantuan-untuk-penyandang-disabilitas> akses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Interview dengan Eko Pujiyanto, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 14 Oktober 2022.

Interview dengan Prameswari Rahma Wardhani Petugas *Back Office* dan *Front Office* SLRT Wijaya Makmur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 5 September 2022.

Interview dengan Sukimin Manajer SLRT dan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada 30 Mei 2022.

Interview dengan Sukimin Manajer SLRT dan Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada 30 Oktober 2022.

Interview dengan Suparmi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 2022.

Interview kepada Paiyem, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 2022.

Kelas Maya Terbaik, Pengertian Masalah Sosial Faktor dan Contohnya, 2020, https://definisipengertian.net/pengertian-masalah-sosial/#Pengertian_Masalah_Sosial. Accsses pada tanggal 20 April 2020.

Permensos Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Bab 1 Pasal 1 Poin 1.

Permensos Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Bab 1 Pasal 2.

Permensos Nomor 8 Tahun 2012.

Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021, BRS No.07/01/Th. XXV, 17 Januari 2022.

Surat Keputusan SLRT Wijaya Makmur Kabupaten Sukoharjo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA